

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER I
MEDAN DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PRAJURIT TNI AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN HOMOSEKSUAL**

(Studi Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019)

TESIS

**Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER I MEDAN DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI AD YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN HOMOSEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019)**

**(Widia Ningsih, 2020112048, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 156 halaman, 2022)**

ABSTRAK

Pertimbangan Hakim adalah suatu dasar dari putusan yang akan diputus oleh Hakim dan di dalamnya memuat alasan-alasan Hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan putusan yang diambil. Pada putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019 terdakwa mendapat ancaman dari saksi-2 untuk melakukan homoseksual, terdakwa dijatuhkan pidana penjara 5 bulan 10 hari dan dipecat dari dinas militer. Sesuai Pasal 48 KUHP seseorang yang mendapat ancaman tidak dapat dihukum. Rumusan masalah 1) bagaimana pembuktian Oditur Militer terhadap TNI AD yang melakukan homoseksual pada Putusan Pengadilan Militer I Medan. 2) bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap prajurit TNI AD yang melakukan homoseksual. 3) apakah penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Militer I Medan telah sesuai dengan tujuan hukum. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode yuridis normatif. Sifat penelitiannya deskriptif menggunakan data primer dan sekunder. Pembuktian yang dilakukan Oditur Militer terhadap Prajurit yang melakukan homoseksual berpedoman pada surat dakwaan, sehingga diperoleh 3 alat bukti berupa keterangan saksi-1, saksi-2, saksi-3, keterangan terdakwa dan alat bukti berupa 4 surat. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Prajurit TNI yang melakukan homoseksual, yaitu terdakwa tidak berusaha menghentikan perbuatan saksi-2, saat terdakwa dipertemukan dengan saksi-2, terdakwa tidak merasa takut atau tidak ada rasa trauma melihat saksi-2, terdakwa juga memberi alibi mengenai ancaman yang diberikan oleh saksi-2 agar terhindar dari tuntutan, Hakim tidak menemukan alasan pemaa dari diri terdakwa. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Militer I Medan telah sesuai dengan nilai kemanfaatan karena Hakim memidana terdakwa dan saksi-2, namun kepastian hukum dan nilai keadilan belum terpenuhi karena pengaturan secara khusus mengenai larangan homoseksual belum diatur dan yang mengajak dan yang memiliki inisiatif melakukan hubungan sesama jenis adalah saksi-2, hukuman terdakwa seharusnya lebih ringan dari saksi-2.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Homoseksual, Tentara Nasional Indonesia

**CONSIDERATION OF MILITARY COURT JUDGE I MEDAN IN
IMPOSING CRIMINAL AGAINST TNI AD SERVANTS WHO
COMPLETE CRIMINAL ACTS OF HOMOSEXUAL DECENCY
(Study of Decision Number 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019)**

(Widia Ningsih, 2020112048, Magister Of Law, Faculty of Law Andalas
University, 156 pages, 2022)

ABSTRACT

The judge's consideration is a basis for the decision that will be decided by the judge and it contains the judge's reasons as a form of accountability to the community to the decision taken. In decision Number 130 K/PM.I-02/AD/XII/2019 the defendant received threats from witnesses to commit homosexuality, the defendant was sentenced to 5 months and 10 days in prison and dismissed from military service. According to Article 48 of the Criminal Code, a person who receives a threat cannot be punished. Problem formulation 1) how to prove the Military Prosecutor against the TNI AD who committed homosexuality in the Medan Military Court I Court Decision. 2) what is the basis for the consideration of the Medan Military Court Judge I in imposing a sentence on an army soldier who commits homosexuality. 3) whether the sentence given by the Judge of the Medan Military Court I was in accordance with the purpose of the law. The approach method used is the normative juridical method. The nature of the research is descriptive using primary and secondary data. The evidence carried out by the Military Prosecutor against Soldiers who committed homosexuality was guided by the indictment, so that 3 pieces of evidence were obtained in the form of testimony from witness-1, witness-2, witness-3 testimony from the defendant and evidence in the form of 4 letters. The basis for the judge's consideration of the Medan Military Court I in imposing a crime against a TNI soldier who committed homosexuality, namely the defendant did not try to stop the actions of witness-2, when the defendant was met with witness-2, the defendant did not feel afraid or there was no trauma to see witness-2, the defendant also gave an alibi regarding the threats given by the witnesses to avoid being charged, the judge did not find a reason for forgiveness from the defendant. The criminal sentence given by the Medan Military Court Judge I was in accordance with the value of expediency because the Judge convicted the defendant and witnesses-2, but legal certainty and the value of justice had not been fulfilled because specific regulations regarding the prohibition of homosexuality had not been regulated and those who invited and had the initiative to have intercourse same sex is witness-2, the defendant's sentence should be lighter than witness-2.

Keywords: Judge's Consideration, Criminal Imposition, Moral Crime, Homosexuality, Indonesian National Armed Forces